

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PUNGUTAN LIAR
(Studi Kasus di Kabupaten Takalar)**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

SYAMSIR ALAM
NIM: 10300113030

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsir Alam
NIM : 103001103030
Tempat/Tgl. Lahir : Malaginna, 22 April 1995
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Takalar
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan
Liar (Stdudi Kasus di Kabupaten Takalar)

Penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Takalar, 21 Juni 2017

Penyusun,



SYAMSIR ALAM

NIM : 103001103030

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus Kabupaten Takalar)*”, yang disusun oleh Syamsir Alam, NIM: 10300113030, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 M, bertepatan 06 Zulhijjah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 28 Agustus 2017 M.
06 Zulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dra. Nila Sastrawati, M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Usman Jafar, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Drs. H. Muh Jamal Jamil, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Marilang, SH.,M.Hum	(.....)
Pembimbing II	: Subehan Khalik, S.Ag.,M.Ag	(.....)



Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Syari’ah & Hukum,
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum wr.wb

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan nikmat Imam Islam dan Ihsan yang mengatur segala urusan hamba-Nya termasuk kepada saya sehingga penyusunan skripsi ini yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar dalam KUHP (Studi Kasus Kab Talakar)*” dapat diselesaikan dengan baik sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) sarjana Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. yang telah mengajarkan imam Islam dan ihsan kepada kita semua. Beserta para sahabat-sahabat tabi’u tabi’in yang mengantarkan Islam bisa sampai kepada kita semua.

Rasa syukur atas segala kebahagiaan yang didapat dalam proses penyusunan skripsi ini begitu pula sebaliknya belajar bersabar akan kesulitan dan hambatan yang didapatkan dalam proses penyusunan skripsi ini yang manakala segala sesuatu kejadian membawa hikmah kebaikan untuk semuanya terkhusus pada diri pribadi.

Dengan sangat bangga skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Surmarlin dan Ibu Mariati yang selalu mendukung penuh dalam meneruskan pendidikan, serta doa yang terus menerus, pengorbanan yang tak terhitung, kasih sayang yang tulus tak terhingga, saya selalu bahagia dan bersemangat dalam menjalani kehidupan. Begitu pula kepada adik-adik saya Danial dan Chairul Anwar yang selalu memberikan dukungan, semangat yang besar dan kasih sayang yang tulus. Serta kepada seluruh keluarga besar saya yang

tak henti-hentinya memberikan semangat yang besar untuk bisa berdiri tegak menghadapi segala kesulitan yang dialami.

Dan penuh rasa hormat, ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada pembimbing dalam skripsi ini yang selalu mendampingi, memberikan banyak kontribusi ilmu dan berbagai masukan-masukan, arahan dan nasehat yang membangun terkait judul yang diangkat demi perbaikan skripsi yang lebih baik. Selaku Bapak Dr. Marilang, SH.,MH selaku Pembimbing 1 dan Bapak Subehan Khalik, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing II.

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, para wakil Rektor, dan seluruh staf UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan maksimal.
2. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dra. Nila Sastrawati, M.Hi selaku ketua Jurusan dan Ibu Dr. Kurniati, M.Hi selaku sekretaris jurusan.
4. Teman-teman Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 2013 terkhusus HPK A terimakasih atas dukungan, semangat dan kebersamaannya selama ini.
5. Teman-teman KKN Kecamatan Eremerasa khususnya Desa Barua terimakasih bantuan dan saran selama 2 bulan kkn.
6. Teman-teman SMAN 1 POLUT (IPA 2). Zainal Basri, Fitriani dan yang lain terima kasih karena selalu ada dalam suka maupun duka .

7. Serta terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang selama ini membantu dan mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Penulis


Syamsir Alam



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL/ILUSTRASI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-10
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	11-38
A. Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	18
3. Subjek Tindak Pidana.....	25
B. Tinjauan Umum Pungutan Liar.....	26
1. Definisi Pungutan Liar.....	26
2. Pungutan Liar dalam Perundang-undangan.....	27
3. Faktor-faktor Penyebab Pungutan Liar.....	30
C. Tinjauan Umum Pungutan Liar dalam Hukum Islam.....	31

1. Pengertian Pungutan Liar dalam Hukum Islam.....	31
2. Hukuman Bagi Pelaku Pungutan Liar dalam Hukum Islam.....	34
3. Tolok Ukur Pungutan Liar dalam Hukum Islam.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39-46
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sumber Data.....	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	42
E. Instrumen Penelitian.....	43
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43
G. Pengujian Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.....	47-58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Modus Operandi terjadinya Tindak Pidana Pungutan Liar di Kabupaten Takalar.....	49
C. Peran Satgas dalam Memberantas Pungutan Liar di Kabupaten Takalar..	52
D. Tindak Pidana Pungutan Liar dalam Hukum Islam.....	56
BAB V PENUTUP.....	59-61
A. Kesimpulan.....	59
B. Implikasi Penelitian.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL / ILUSTRASI

Tabel 1. Dasar Hukum Pungli dalam Perundang-undangan.....	27
Tabel 2. Data <i>Informan</i>	41
Tabel 2. Struktur Organisasi.....	49
Gambar 2. Pengaduan Terkait Pungli.....	52



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>Dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيَّ... اَ...	Fathah dan alif atau yaa'	a	a dan garis di atas
اِيَّ	Kasrah dan yaa'	i	i dan garis di atas
اُوَّ	Dhammmah dan waw	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

4. Taa' marbuutah

Transliterasi untuk *taa'marbuutah* ada dua, yaitu *taa'marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* [h].

Contoh :

الرَّادَّةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al- atfal*

الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجَّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعَم : *nu''ima*

عَدُو : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi i.

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (az-zalزالah)*

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruuna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa

Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fizilaal Al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalaalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِإِلَهِ اللَّهِ *diinullah* بِإِلَهِ اللَّهِ *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

hum fi rahmatillaah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-),

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa ma muhammadun illaa rasul

Inna awwala baitin wudi' alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

Swt. = *subhanallahu wata'ala*

Saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*

r.a = *radiallahu 'anhu*

H = Hijriah

M = Masehi

QS.../...4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

NAMA : SYAMSIR ALAM

NIM : 10300113030

**JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PUNGUTAN LIAR DALAM KUHP (Studi Kasus Kab Takalar)**

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar dalam KUHP. Judul ini ditulis karena ingin mengetahui bagaimana peran Satuan Tugas Saber Pungli dalam menangani kasus pungli yang ada di Takalar serta pungutan Liar dalam KUHP, seperti yang kita ketahui di dalam KUHP tidak terdapat pasal yang menjelaskan tentang pungutan Liar. Adapun pokok masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah modus operandi terjadinya tindak pidana pungli di kabupaten Takalar ? 2) Bagaimanakah peran satgas dalam memberantas pungutan liar di Kabupaten Takalar ? 3) Bagaimanakah tindak pidana pungli dilihat dari Hukum Islam ?

Jenis penelitian ini kualitatif lapangan dengan pendekatan yang digunakan adalah: yuridis, sosiologis, dan normatif syar'i. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dengan cara turun langsung kelapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tahap, yaitu : klasifikasi data, reduksi data, editing data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pungutan Liar adalah pungutan yang melebihi ketentuan yang ada atau pungutan yang tidak resmi yang dilakukan oleh pejabat negara dalam memperkaya diri sendiri. Pungutan liar terjadi karena adanya peluang dari pejabat dan masyarakat itu sendiri. Dalam hukum Islam Pungli Termasuk perbuatan yang haram karena mengandung unsur Kezaliman. Adapun yang sudah dilakukan oleh satuan tugas saber pungli Takalar yaitu dengan melakukan sosialisasi ke kantor pelayanan masyarakat, membuat baliho, memberi himbauan kepada masyarakat.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Perlunya keteladanan pimpinan atau atasan, motivasi dan sugesti positif kepada pegawai secara kontinyu serta pendalaman nilai-nilai agama, 2) Di perlukan regulasi yang baik, pengawasan internal maupun eksternal dan peran serta masyarakat, 3) Mengubah sistem manual menjadi sistem digital sehingga tidak terjadi tatap muka antara pihak birokrasi/pejabat pemerintah dengan masyarakat, 4) Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tips kepada Petugas Pelayanan, Mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama, yaitu negara yang didasarkan pada agama tertentu. Menurut ajaran agama Islam, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti mengakui dan meyakini kemahaesaan Allah mengatur hidup dan kehidupan alam semesta termasuk manusia didalamnya. Pengaturan itu dilakukan-Nya melalui hukum-hukum-Nya baik yang tertera dalam wahyu (syariah) maupun yang terdapat dalam alam semesta (sunnatullah). Dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut ajaran Islam, tidak hanya berarti takut kepada Allah, tetapi juga aktif membina dan memelihara berbagai hubungan yang ada dalam kehidupan manusia. Hubungan-hubungan itu adalah (1) hubungan manusia dengan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, (2) hubungan manusia dengan dirinya sendiri, (3) hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan (4) hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan. Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) *hukum*, (2) *hukm* dan *ahká*, (3) *syariah* atau *syariat*, (4) *fiqih* atau *fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan.

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah-laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan

atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Dasar dan kerangka hukum Islam ditetapkan oleh Allah.

Hukum Islam, sebagai bagian agama Islam, melindungi hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat pada tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi ‘Pembuat Hukum Islam’ yaitu Allah dan Rasul-Nya dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam.

Kalau dilihat dari pembuat Hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah : *pertama*, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyāt*, *hajjiyāt* dan *tahsiniyyāt*. Kebutuhan primer (*daruriyyāt*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyāt*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier (*tahsiniyyāt*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain. *Kedua*, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. *Ketiga*, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari *usul al fiqh* yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.

Dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Dengan mengambil yang bermanfaat , mencegah atau menolak yang mudarat bagi

kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak.¹

Asas-asas dalam hukum Islam banyak, disamping asas-asas yang berlaku secara umum, masing-masing bidang dan lapangan mempunyai asas-asasnya sendiri. Salah satunya asas-asas hukum pidana diantaranya adalah:

1. Asas Legalitas

Yang dimaksud dengan asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini didasarkan pada Al-qur'an surat Al-Isrā (17) ayat 15 .

2. Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain

Dalam surat Al-An'ām (6) ayat 164 Allah menyatakan bahwa setiap pribadi yang melakukan sesuatu kejahatan akan menerima balasan kejahatan yang dilakukannya. Jelas bahwa orang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Karena pertanggungjawaban pidana itu sifatnya individual, kesalahan seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.

3. Asas praduga tak bersalah

Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu.

Seperti yang sering kita saksikan dalam berita yang memaparkan tentang kedzaliman para pejabat negeri ini yaitu melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah QS Al-Baqarah/2: 188.

¹Juhaya S. Praja, *Hukum Islam* (Cet. XX; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h.62

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٥٨﴾

Terjemahannya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”²

Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat.

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan dimana pidana itu menjelma.³

Dalam KUHPid, jenis-jenis pidana diatur dalam Buku 1 pada Pasal 10 yang menentukan bahwa pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan

² Kementrian Agama, *Al-quran & Terjemahan*, No: P.VI/1/TL.02.1/111/2012 (Sukses Publishing, 2012), h. 30.

³ W.P.J. Pompe, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), h. 1.

- 1) Pencabutan hal-hal tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan Hakim.⁴

Ada sejumlah kepentingan hukum yang dilindungi melalui hukum pidana apabila kepentingan itu telah menjadi kepentingan umum. Kepentingan-kepentingan tersebut yaitu :

a. Kepentingan Hukum Negara

Kepentingan hukum negara adalah kepentingan hukum dari negara sebagai keseluruhan. Yang menjadi kepentingan hukum negara, yaitu berkelanjutan, ketentraman, dan keamanan negara.

b. Kepentingan Hukum Masyarakat

Kepentingan hukum masyarakat adalah kepentingan hukum dari masyarakat itu sendiri. Yang menjadi kepentingan hukum masyarakat yaitu ketentraman dan keamanan masyarakat.

c. Kepentingan Hukum Perseorangan

Kepentingan Hukum perseorangan adalah kepentingan hukum dari seseorang, tetapi gangguan terhadap kepentingan hukum ini telah melibatkan kepentingan umum.

Aspek peraturan merupakan aspek yang paling berkembang dalam hukum pidana. Pada masyarakat dahulu, peraturan-peraturan umumnya tidak tertulis melainkan diwariskan dalam ingatan dan praktik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pada masyarakat modern, dikarenakan makin rumitnya hubungan-hubungan dalam masyarakat, dirasakan kebutuhan adanya peraturan-peraturan hukum pidana yang tertulis.

⁴*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), h. 15.

Membicarakan masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang. Begitupun dalam pelayanan publik, hukum dan masyarakat berperan penting. Dan salah satu yang sering terjadi dalam pelayanan publik adalah pungutan liar (Pungli). Perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungutan liar sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam penjajahan. Namun baru diperkenalkan sebagai Tindak Pidana Pungli pada September 1977.

Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Istilah lain yang digunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain-lain.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pungutan liar (pungli) diantaranya:

- a. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri .
- b. Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan kerja keras yang dilakukan.
- c. Faktor cultural dan budaya, karena pungli dianggap hal yang wajar dalam suatu instansi maka hal akan terus dilakukan tanpa adanya rasa bersalah.
- d. Lemahnya sistem control dan pengawasan dari atasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan diteliti lebih lanjut dan menuangkannya ditugas akhir (skripsi) dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus di Kab Takalar)”**.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah modus operandi terjadinya tindak pidana pungli di kabupaten Takalar?
2. Bagaimanakah peran satgas dalam memberantas pungutan liar di Kabupaten Takalar?
3. Bagaimanakah tindak pidana pungli dilihat dari Hukum Islam?

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan, maka akan dipaparkan mengenai batasan-batasan yang menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokus.

1. Fokus Penelitian

Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Islam dalam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar dalam KUHP (Studi kasus Kabupaten Takalar).

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada wilayah kabupaten Takalar. Judul skripsi ini mengembangkan sejauh mana efektifitas penanganan pungutan liar oleh Satuan Tugas Kabupaten Takalar.

2. Deskripsi Fokus

Untuk mendapatkan gambaran dan memudahkan pemahaman serta memberi persepsi yang sama antara penulis dengan pembaca dan memperjelas mengenai judul yang dimaksud, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian yang sesuai dengan variabel yang ada dalam skripsi ini, sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam pembahasan selanjutnya. Adapun istilah yang digunakan yaitu :

- a. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, serta pengolahan. Analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Tinjauan juga didefinisikan sebagai kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan tertentu.⁵
- b. Hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang didasarkan atas syaria Islam dengan sumber hukum utamanya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- c. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan dan korupsi.⁶

C. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Draf ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam KUHP (Studi Kasus di Kabupaten Takalar)”. Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa buku, penelusuran internet, dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang pungutan liar. Adapun penelusuran-penelusuran tersebut, yaitu :

Pertama, buku karya H. Mohammad Daud Ali, yang berjudul “*Hukum Islam (pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*” Jakarta. Buku ini membahas tentang kedudukan hukum Islam, kerangka dasar agama Islam.

⁵kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. LII: Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 928.

⁶ <http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html>

Buku ini juga membahas tentang asas-asas hukum Islam baik asas-asas umum maupun asas-asas dalam hukum publik dan perdata, kaidah-kaidah fiqh serta Al-Ahkam Al-Khamsah.

Kedua, buku karya Victor M. Situmorang, yang berjudul "*Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*" (Jakarta). Buku ini memfokuskan tentang masalah Tindak Pidana Korupsi khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai Negeri sipil. Karena adanya kesulitan dalam memberantas terutama karena sukarnya mendapat bukti-bukti yang otentik serta kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam bidang ekonomi Negara, moral, mentalitas para pejabat, kekuatan hukum tradisi/kebudayaan masyarakat.

Ketiga, buku karya R. Wiyono, yang berjudul "*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*" buku ini membahas tentang tindak pidana korupsi yang mana didalamnya membahas tentang penjelasan pasal-pasal beserta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Keempat, buku karya H. M. Nurul Irfan, M.Ag, yang berjudul "*Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*" buku ini menjelaskan Tindak Pidana Korupsi dan Fiqh Jinayah dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam buku ini tidak menjelaskan tentang pungli secara spesifik.

D. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus operandi terjadinya tindak pidana pungutan liar di kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui pendekatan-pendekatan apakah yang digunakan oleh satgas dalam memberantas tindak pidana pungli di kabupaten Takalar.
3. Untuk mengetahui tindak pidana pungutan liar Hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan praktisi

Kepada lembaga yang bertanggung jawab diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara efisien sehingga masalah pungutan liar bisa di berantas.

2. Kegunaan teoritis

Penulis berharap dapat memberikan informasi kepada masyarakat, pemerintah, baik pusat maupun pemerintah setempat agar bisa mengetahui tentang tindak pidana pungli dan aturan-aturannya.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Tindak Pidana*

1. pengertian tindak pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Para ahli hukum umumnya mengidentifikasikan adanya tiga persoalan mendasar dalam hukum pidana. **Saner**, berpendapat bahwa hal itu berkaitan dengan, *onrecht*, *schuld*, dan *strafe*.⁷ Sementara itu, **Packer** menyebut ketiga masalah tersebut berkenaan dengan *crime*, *responsibility*, dan *punishment*.⁸ Menurut **Soedarto**, persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu.⁹ Dengan kata lain, masalah

⁷ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 7.

⁸ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* , h. 7.

⁹ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 7.

mendasar dalam hukum pidana berhubungan dengan persoalan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan.¹⁰ Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Aturan hukum mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan-perbuatan lain di luar kategori tersebut. Dengan adanya aturan mengenai tindak pidana dapat dikenali perbuatan-perbuatan yang dilarang dan karenanya tidak boleh dilakukan.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.¹² Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.¹³

¹⁰ Chairul Huda, *Tiada pidana tanpa kesalahan*, h. 13.

¹¹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), h. 62.

¹² H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah), h. 23.

¹³ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah), h. 23.

Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.V.S Belanda maka istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit* (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman).

Pada dasarnya, istilah *strafbaar feit* dijabarkan secara harfiah terdiri dari tiga kata. *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh dihukum.

Selanjutnya, beberapa rumusan tentang tindak pidana menurut para pakar hukum pidana perlu dikemukakan, menurut Simons sebagaimana dikutip. *Strafbaar feit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab.

Penentuan tindak pidana merupakan persoalan sekitar pengaturan kewajiban-kewajiban terhadap individu untuk tidak melakukan (atau justru keharusan untuk melakukan) suatu perbuatan tertentu. Substansi demikian menyebabkan hal ini mendapat tempat primer. Pada satu sisi, kewajiban-kewajiban tersebut dapat saja diartikan sebagai perintah. Perintah untuk tidak berbuat yang dilarang oleh hukum pidana. **Remmelink** mengatakan “hukum pidana memiliki karakter khas sebagai hukum (yang berisikan) perintah”.¹⁴

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 syarat mengenai kekuasaan mutlak peraturan perundang-undangan untuk menentukan tindak pidana terdapat dalam Pasal 281. Bahwa setiap orang berhak

¹⁴ Remmelink (Jakarta: Kencana, 2011), h. 19.

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, yang pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian “tidak dituntut” disini juga termasuk “tidak dinyatakan melakukan tindak pidana dan karenanya dikenakan tuntutan pidana” kecuali peraturan perundang-undangan telah terlebih dahulu menyatakannya sebagai perbuatan yang terlarang dan diancam pidana barangsiapa yang melakukannya. Ditambah lagi penuntutan pidana tidak boleh dilakukan atas dasar hukum yang berlaku surut (*non retroactive law*). Kata-kata “tidak berlaku surut” merupakan karakteristik dasar aturan tentang tindak pidana, dan adanya jaminan konstitusional mengenai hal ini untuk melulu melalui peraturan perundang-undangan, semakin memperkuat prinsip ini.

Ada tidaknya suatu tindak pidana, tidak tergantung pada apakah ada orang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, tidak tergantung dari adanya pertanggungjawaban pidana pembuat. Melainkan tergantung pada apakah ada larangan peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menegaskan monopoli peraturan perundang-undangan dalam penetapan suatu tindak pidana.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan **Simons** dan **Van Hamel**. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.

Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵ Sedangkan **Van Hamel** mengatakan bahwa undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁶ Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. “Berhubungan dengan kesalahan’ ataupun ‘dilakukan dengan kesalahan’ merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan. Sementara itu **Schaffmeister** mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.¹⁷

Pasal 1 Ayat (1) KUHP menghendaki penentuan tindak pidana hanyalah berdasar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekalipun dalam rancangan KUHP prinsip ini sedikit banyak disimpangi.

Dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana di negara-negara *civil law* lainnya, tindak pidana umumnya dirumuskan dalam kodifikasi. Namun demikian, sejauh ini tidak terdapat ketentaun dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana. Undang-undang 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, belum secara mendetail menentukan bagaimana merumuskan ketentuan tentang tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 27.

¹⁶ Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*, h. 27.

¹⁷ Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*, h. 27.

Tindak pidana pertama-tama berisi larangan terhadap ‘perbuatan’. Dengan demikian, pertama-tama suatu tindak pidana berisi larangan terhadap kelakuan-kelakuan tertentu. Dalam hal tindak pidana materiil, larangan ditujukan kepada penimbulkan akibat. Tindak pidana berisi rumusan tentang akibat-akibat yang terlarang untuk diwujudkan.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “*Tindak Pidana*” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.

Menurut Profesor POMPE perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹⁸

Perbedaan yang ada antara teori dengan hukum positif itu sebenarnya hanyalah bersifat semu. Oleh karena yang terpenting bagi teori itu adalah, bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk “*schuld*”, yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedang hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu “*schuld*” tanpa adanya suatu “*wederrechtelijkheid*”. Dengan demikian sesualah sudah apabila pendapat menurut teori yang berbunyi “*geen straf zonder schuld*” atau “tidak ada sesuatu hukuman dapat dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan”, yang berlaku baik bagi teori maupun bagi hukum positif.

¹⁸ P.AF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), h. 182.

Syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, dan
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum. Sedang syarat-syarat penyerta seperti di maksud di atas itu merupakan syarat-syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menjabarkan rumusan delik ke dalam unsur-unsur, maka yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu” yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*een nalaten*”¹⁹ yang juga berarti “hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang)”.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur lahir atau unsur objektif dan unsur batin atau unsur subjektif. Dalam masalah ini, Satochid Kartanegara, mengatakan bahwa unsur-unsur delik, terdiri dari dua golongan yaitu unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa suatu tindak-tanduk, jadi suatu

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2013), h. 192-193.

tindakan, suatu akibat tertentu (*een bepaalde gevolg*) dan berupa keadaan (*omstendigheid*) yang semuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.²⁰ Adapun unsur subjektif adalah unsur yang terdapat pada diri pembuat atau *in de dader aan wezig*. Unsur-unsur subjektif ini berupa hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (*toerekeningsvat baarheid*) dan kesalahan seseorang (*schuld*). Yang dimaksud *toerekeningsvat baarheid* adalah hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvat baarheid* apabila orang tersebut memenuhi tiga syarat, yaitu keadaan jiwa orang tersebut dapat dimengerti akan nilai dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, orang tersebut dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan.

Dalam masalah layak dan tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya ini, tongat mengatakan bahwa sementara itu berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung jawab, pembentuk KUHP berpendirian bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab. Konsekuensi dari pendirian ini adalah bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya pengadilan, kecuali apabila terdapat keragu-raguan terhadap unsur tersebut.

Bertolak dari pendirian pembentuk KUHP, dapat diketahui bahwa didalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab. KUHP hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggung jawab sebagaimana yang terdapat dalam

²⁰H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, h. 27.

pasal 44.²¹ Toerekeningsvat baarheid atau hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, hal ini termasuk unsur subjektif. Berikutnya akan dijelaskan masalah *schuld* sebagai salah satu bentuk subjektif yang lain. *Schuld* dalam bahasa Indonesia berarti kesalahan seseorang.

Kesalahan seseorang atau *schuld* dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu dari sudut *social etis* dan dari sudut hukum pidana. *Schuld* dalam perspektif *social etis* mempunyai arti bahwa hubungan antara jiwa pelaku dengan akibat perbuatannya adalah demikian rupa sehingga perbuatana ataupun akibat dari perbuatannya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Sedang *schuld* dalam pengertian hukum pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuld*) yang dapat berupa *dolus* atau berupa *culpa*.²²

Jadi, kesalahan seseorang atau *schuld* yang merupakan unsur subjektif kedua dari tindak pidana bisa berupa *dolus* atau dalam bahasa Belanda disebut *opzet* yang berarti kesengajaan dan dapat berupa *culpa* atau ketidaksengajaan atau kealpaan. *Opzet* atau kesengajaan secara umum mempunyai tiga bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, kesengajaan dengan tujuan pasti atau merupakan keharusan, dan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan.²³

Indikasi adanya *opzet* atau unsur kesengajaan pada diri pelaku tindak pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan beberapa istilah. Yaitu dengan sengaja, seperti dalam pasal 333 dan 338 KUHP, yang diketahuinya, seperti dalam pasal 286 KUHP, dengan maksud seperti dalam pasal 362 KUHP.²⁴

²¹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad)*, (cet ke 16 Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 36.

²² H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah 2011), h. 29.

²³ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, h. 29.

²⁴ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, h. 29.

Di samping kesalahan atau *schuld* bisa berupa *opzet* atau kesengajaan, kesalahan juga bisa berupa *culpa*, kealpaan, atau ketidaksengajaan. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan arti *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak berat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi.²⁵

Dalam KUHP, di samping disebut delik sengaja pada suatu rumusan disebut pula delik *culpa* pada rumusan berikutnya. Misalnya KUHP menyebut pembunuhan dengan sengaja pada pasal 338 KUHP yang diancam pidana maksimum 15 tahun.

Selanjutnya tindak pidana akibat *culpa* atau kelalaian ini dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgsmisdrijven*) dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat, terjadinya akibat itu maka terciptalah delik kelalaian (*culpa*). Sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kekuranghati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Unsur subjektif tindak pidana adalah unsur yang terdapat pada diri pelaku atau pembuat, *in de dader aan wezig*. Unsur subjektif ini dapat berupa hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang dilakukannya, *toerekeningsvat baarheid* dan dapat berupa kesalahan seseorang, *schuld*. *Schuld* ini dapat berupa *dolus* atau *opzet* atau kesengajaan dan dapat pula berupa *culpa*, kelalaian, kealpaan, atau ketidaksengajaan.

²⁵ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah 2011), h. 30.

Disamping unsur subjektif, dalam tindak pidana juga terdapat unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat diluar manusia. Unsur objektif ini bisa berupa suatu tindakan, suatu akibat tertentu, *een bepaldegevolg* dan berupa keadaan, *omstendingheid* yang semuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.²⁶

Berkaitan dengan masalah unsur-unsur tindak pidana, Bambang Poermono menjelaskan bahwa, elemen delik itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrecht mating/wederrechtelijk*) dan elemen subjektif berupa adanya seorang pembuat (*dader*), yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Kiranya sesuai sekali dengan apa yang diuraikan oleh V. Bemmelen bahwa elemen-elemen dari *strafbaar feit* dapat dibedakan menjadi objektif dan subjektif, semuanya itu merupakan elemen yang diperlukan untuk menentukan dijatuhkannya pidana sebagaimana diancamkan.²⁷

Pada prinsipnya menurut Bambang Poermono, pembagian atas unsur dirumuskan berdasarkan:

- a. bagian obyektif dari perbuatan pidana yang terdiri dari perbuatan dan akibatnya, yang substansinya merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum yang berlaku (hukum positif) dan dapat diancam dengan pidana.
- b. Bagian subyektif yaitu berkaitan dengan subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan substansinya merupakan kesalahan atau perbuatan yang salah.

²⁶ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah 2011), h. 31.

²⁷ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah 2011), h. 32.

Sedangkan Apeldom menilai bahwa unsur perbuatan pidana terdiri atas unsur obyektif, berupa suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig* atau *wederrechtelijk*) dan unsur subyektif, berupa orang yang berbuat (*dader*) yang mampu bertanggungjawab atau yang dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) atas perilakunya yang bertentangan dengan hukum.

Sementara VOS membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara lebih terinci, yang terdiri atas :

- a. Perbuatan atau kelakuan, yaitu berbuat atau tidak berbuat
- b. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan, yang terjadi dalam perbuatan pidana yang selesai (tidak gagal atau percobaan), dimana unsur ini dapat dianggap nyata (ternyata ada pada suatu perbuatan dan yang terkadang tidak dianggap penting dalam konteks perbuatan pidana formal akan tetapi terkadang unsur akibat ini dinyatakan secara tegas (pada perbuatan pidana material)
- c. Kesalahan, yang bisa diwujudkan dalam bentuk sengaja atau kealpaan
- d. Melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan
- e. Unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam undang-undang, seperti misalnya: dimuka umum (pasal 60 KUH Pidana) atau direncanakan lebih dahulu (pasal 340 KUH Pidana)

Dalam pandangan yang agak berbeda untuk beberapa unsur, *Hazewinkel* Suringa mengemukakan bahwa unsur perbuatan pidana terdiri dari:

- a. Kelakuan orang (*een doen op de nalaten*)
- b. Akibat, yang ditetapkan dalam rumusan undang-undang (berdasarkan pembagian atas perbuatan pidana formal dan material)

- c. Kondisi psikis, dengan kualifikasi dengan maksud/tujuan, dengan sengaja dan dengan alpa
- d. Unsur obyektif yang menyertai perbuatan pidana itu dilakukan, seperti misalnya di muka umu, atau karena diadukan
- e. Syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan
- f. Melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang memegang peranan penting (pasal 167 KUH Pidana, tentang memasuki rumah atau pekarangan yang dipakai atau digunakan orang lain secara melawan hukum dan pasal 406 KUH Pidana, tentang sengaja atau melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang, baik seluruhnya atau sebagian).

Dan pandangan yang relatif sederhana adalah pandangan Pompe yang menyatakan bahwa unsur perbuatan pidana, terdiri atas tiga unsur, yaitu:

- a. Melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- b. Kesalahan atau schuld
- c. Membahayakan, mengganggu atau merugikan kepentingan masyarakat umum (social)

Dari berbagai pendapat tentang unsur-unsur perbuatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perbuatan pidana setidaknya terdapat unsur-unsur:

- a. Kelakuan, yaitu sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang (*doenop nalaten*)
- b. Akibat dari perbuatan, yang dibedakan berdasarkan rumusan perbuatan pidana
- c. Unsur obyektif yang menyertai kondisi perbuatan pidana, baik yang berkualifikasi memberatkan, ataupun yang meringankan

d. Melawan hukum (*wederechtelijk*)

Unsur-unsur Tindak Pidana (delik) menurut Andi Zainal Abidin dibedakan atas dua unsur, yaitu:

1. unsur perbuatan terdiri dari tiga unsur:
 - a. mencocoki unsur delik
 - b. ada sifat melawan hukum
 - c. tidak ada alasan pembeda
2. unsur pembuat yang terdiri dari tiga unsur:
 - a. ada kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa
 - b. tidak ada alasan pemaaf
 - c. dapat dipertanggungjawabkan.²⁸

Akan tetapi kedua bagian itu tidaklah terpisah secara prinsipil melainkan hanya bersifat teknis. Tujuannya ialah untuk menggampangkan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pemisahan itu diadakan pada waktu menyelidiki ada atau tidaknya perbuatan (peristiwa) pidana guna mensistematiseer “tumpukan syarat-syarat pembedaan yang ruwet”. Dan pada waktu hendak menjatuhkan pidana (vonnis) kedua segi tersebut disatukan kembali. Ini berarti bahwa kedua segi tersebut sama-sama pentingnya untuk menjatuhkan pidana.²⁹

Dari sudut lain dapat pula diartikan demikian: fungsi yang negatif dari sifat melawan hukum ialah bila perbuatan yang mencocoki rumusan delik dikecualikan oleh aturan hukum tak tertulis seperti telah dikemukakan diatas; fungsi yang positif ialah apabila sesuatu perbuatan tidak dilarang oleh sesuatu aturan undang-undang tetapi dipandang tak patut oleh masyarakat atau oleh aturan

²⁸ A. Zainal Abidin, dkk, *Asas Hukum Pidana dan beberapa penerapan tentang delik-delik khusus*, (Djakarta-Makassar: Praoantja, 1962, h. 34.

²⁹ A. Zainal Abidin, dkk, h. 36

hukum tidak tertulis. Fungsi yang positif ini tentulah tak dapat berlaku dalam sistem hukum pidana positif kita sekarang ini mengingat 1 ayat 1 KUHP.³⁰

Aliran yang materil ini mendasarkan pikirannya pada kepentingan masyarakat disamping kepastian hukum, sehingga apa-apa yang dilarang oleh ketentuan undang-undang seringkali dapat dikecualikan oleh aturan hukum yang tidak tertulis.

Aliran materil menitik beratkan makna melawan hukum itu pada masyarakat dengan tidak meninggalkan sama sekali segi-segi yang formil. Aliran yang materil menganggap penting pula hal mencocoki rumusan delik berdasarkan pertimbangan asas legalitas, sehingga fungsi yang positif dari pada sifat melawan hukum yang materil tidak dapat dipakai seperti pendapat-pendapat VOS dan HAZEWINKEL SURINGA.³¹

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana sifatnya sangat subjektif. Tetapi ada atau tidaknya kesalahan seseorang yang berbuat peristiwa pidana seringkali harus dinilai secara lahir.³²

Alasan-alasan pemaaf yang ditujukan kepada dader tidaklah berarti bahwa sekaligus dapat juga menjadi alasan untuk menghilangkan peristiwa pidana (feit). Demikian menurut pendapat yang dualistik. Sebab jika ada peristiwa pidana belum tentu ada orang yang harus dipidana pula.³³

Alasan-alasan pembenar yang ditujukan kepada perbuatan (feit) tidak pula sekaligus berarti bahwa kesalahan pembuat turut hapus. Lalu apa yang dihapus? Yaitu dapat dipidananya pembuat, oleh karena perbuatan yang seyogianya harus

³⁰ A. Zainal Abidin, dkk, *Asas Hukum Pidana dan beberapa penerapan tentang delik-delik khusus*, (Djakarta-Makassar: Praoantja, 1962, h. 40

³¹ A. Zainal Abidin, dkk, h. 44

³² A. Zainal Abidin, dkk, h. 50

³³ A. Zainal Abidin, dkk, h. 51

dipertanggungjawabkan kepadanya ternyata bukanlah perbuatan yang melawan hukum.³⁴

Untuk mengetahui bahwa sesuatu perbuatan itu melawan hukum pertama harus dilihat (diperiksa) dari sudut rumusan-rumusan delik. Kemudian diperiksa pula dari sudut kepatutan didalam masyarakat dimana perbuatan itu terjadi. Jadi pertama-tama ketentuan undang-undang pidana, kemudian rumusan-rumusan perasaan keadilan msyarakat. Jika kedua tinjauan itu telah nyata memberikan landasan kearah itu maka perbuatan itu adalah perbuatan yang melawan hukum. Kedua faktor itulah merupakan fundamen (dasar) untuk adanya *wederrechtelijkheid* itu.³⁵

Untuk adanya kesalahan diperlukan adanya sengaja atau kelalaian yang merupakan dasar bagi adanya kesalahan.

3. Subjek Tindak Pidana

Terkait dengan subjek tindak pidana perlu dijelaskan, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi. Artinya, barangsiapa melakukan tindak pidana, maka ia harus bertanggung jawab, sepanjang pada diri orang tersebut tidak ditemukan dasar penghapus pidana.³⁶ Selanjutnya, dalam pidana dikenal juga adanya konsep penyertaan (*deelneming*). Konsep penyertaan ini berarti ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan atau melakukan tindak pidana. Menjadi persoalan, siapa dan bagaimana konsep pertanggung jawaban pidana, dalam

³⁴ A. Zainal Abidin, dkk, *Asas Hukum Pidana dan beberapa penerapan tentang delik-delik khusus*, (Djakarta-Makassar: Praoantja, 1962, h. 51

³⁵ A. Zainal Abidin, dkk, h. 51

³⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberat dan Peringan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 16.

hukum pidana kualifikasi pelaku (subjek) tindak pidana diatur dalam pasal 55-56 KUHP. dalam KUHP terdapat lima bentuk, yaitu sebagai berikut:³⁷

- a. Mereka yang melakukan (dader). Satu orang atau lebih yang melakukan tindak pidana.
- b. Menyuruh melakukan (doen plegen). Dalam bentuk menyuruh melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain.
- c. Mereka yang turut serta (medeplegen). Adalah seseorang yang mempunyai niat sama dengan niat orang lain, sehingga mereka sama-sama mempunyai kepentingan dan turut melakukan tindak pidana yang diinginkan.
- d. Penggerakan (uitlokking). Penggerakan atau dikenal juga sebagai *Uitlokking* unsur perbuatan melakukan orang lain melakukan perbuatan dengan cara memberikan/menjanjikan sesuatu, dengan ancaman kekerasan, penyesatan menyalahgunakan martabat dan kekuasaan beserta pemberian kesempatan, sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 55 ayat 1 angka 2.
- e. Pembantuan (medeplichtigheid). Pada pembantuan pihak yang melakukan membantu mengetahui akan jenis kejahatan yang akan ia bantu.

B. Tinjauan Umum Pungutan Liar

1. Definisi Pungutan Liar

Dari segi bahasa, pungutan liar dapat dibagi menjadi dua kata, yakni 'pungutan' dan 'liar'. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, pungutan berarti barang yang dipungut³⁸, dan liar berarti sembarangan, tidak sesuai dengan

³⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1991), h. 73-75.

³⁸ Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta; Modern English Press. 1991), h. 1206.

aturan, tidak diakui oleh yang berwenang³⁹. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pungutan liar berarti sesuatu (barang) yang dipungut atau diambil dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Jika Dikaji lebih dalam maka Pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum.

Pungli adalah Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut

Sebenarnya, istilah pungli hanyalah merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam dunia hukum (pidana), istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya⁴⁰.

³⁹ Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, h. 869.

⁴⁰ www.hukumonline.com

2. Pungutan Liar dalam Perundang-Undangan

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun demikian dasar hukum untuk menjerat pelaku pungutan liar sendiri diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Dasar Hukum Pungli dalam Perundang-undangan

No.	Ketentuan Hukum	Jenis	Ancaman Pidana
1.	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap	Penerima suap	3 Tahun penjara atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 15.000.000,-
2.	KUHP (Pasal 368)	Pemerasan	9 Tahun Penjara
3.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5 ayat (1))	Pemberian/menjanjikan pada pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-
4.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara penerima pemberian/janji	Pidana penjara paling singkat 1 Tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling

	Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5 ayat (2))		sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-
5.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 11)	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima hadiah/janji padahal diketahui karena kekuasaan/kewenangan	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-
6.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal) 12B)	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Penerima gratifikasi	Pidana penjara seumur hidup/paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- paling banyak Rp. 1.000.000.000,-
7.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.

	(Pasal 12E)		50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-
8.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12E)	Pemberi hadiah/janji pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena kekuasaan/kewenangan	Pidana penjara paling lama 3 tahun denda paling banyak Rp. 150.000.000,-
9.	PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Perbuatan tercela	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberhentian Tidak dengan hormat • Pemberhentian dengan hormat • Tidak atas permintaan sendiri

Sumber : <https://komisi-kejaksaan.go.id/komjak/wp-content/uploads/2017/03/Saber-Pungli-Kejati-Sumut.pdf>

3. Faktor-faktor Penyebab Pungutan Liar

Faktor penyebab pungli secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal berkaitan dengan pelaku pungli sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya, antara lain:

- Ingin memperoleh kemawar hidup
- Kondisi sosial ekonomi
- Lemahnya iman dari pelaku pungli

- d. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang
- e. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara
- f. Kemiskinan dan keserakahan
- g. Budaya memberi upeti
- h. Imbalan dan hadiah
- i. Apatisme/tidak mau tahu
- j. Gagalnya pendidikan agama dan etika

Terhadap faktor penyebab pungli yang disebutkan terakhir, gagalnya pendidikan agama dan etika, berasal dari pemikiran Franz Magnis Suseno, yang mengatakan bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah pungli karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap bahwa agama hanya berkutat pada masalah bagaimana cara beribadah saja sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Franz, agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya. Sebab, agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika kekuatan relasi emosional yang dimiliki pemeluk agama diterapkan dengan benar, bisa menyadarkan umat bahwa pungutan liar dapat membawa dampak yang sangat buruk.⁴¹

Sedangkan faktor eksternal berupa sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang sehingga bisa membuka peluang terjadinya pungli. Yaitu:

- a. Kelemahan mekanisme organisasi
- b. Penegakan hukum yang tidak konsisten
- c. Lemahnya pengawasan

⁴¹ H.M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 37.

- d. Budaya permisif/serba membolehkan

C. Tinjauan Umum Pungutan Liar Dalam Hukum Pidana Islam

1. Istilah Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam pungutan liar diantaranya *Risywah* (Penyuapan). Secara etimologis kata *risywah* berasal dari bahasa Arab رشا - يرشو yang *masdar* atau *verbal noun*nya bisa dibaca "رشوة" *رشوة* atau رشوة (huruf *ra'*-nya dibaca *kasrah*, *fathah* atau *dammah*) berarti الجعل yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata *risywah*, ia mengatakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat رشالفرخ anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.⁴²

Adapun secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemashlahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.⁴³

Dalam sebuah kasus, *risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rāsyī*), pihak penerima pemberian tersebut (*al-murtasyī*) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahterimakan. Akan tetapi, dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek *risywah*-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai *broker* atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya, pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak dimaksud.

⁴² H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011), h. 89.

⁴³ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam*, h. 89.

Syamsul Haq al-Azim Abadi dalam pernyataannya mengemukakan bahwa pemberian yang dilakuakn dengan niat agar penyimpangan dan penyelewengan pihak penerima bisa diubah semakin baik, sebaiknya tidak dilakukan dalam masalah peradilan dan pemerintahan (*al-quḍāh wa al-wulāh*) sebab tanpa diberi sogok atau hadiah pun membela dan menegakkan keadilan sudah menjadi tugas hakim dan pemerintah. Maka, tidak layak jika dalam berbuat adil harus memberi suap.⁴⁴

Adapun beberapa hadis tentang *risywah* yang dibahas oleh para ulama tersebut adalah bahwa laknat Allah akan (ditimpakan) kepada orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum, Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dan Rasulullah melaknat orang yang menyuap, orang yang disuap, dan orang yang menghubungkan, yaitu orang yang berjalan diantara keduanya. Hadis dimaksud adalah sebagai berikut:

Al-Syaukani mengemukakan bahwa diantara dalil yang menunjukkan haramnya *risywah* adalah penafsiran Hasan (al-Basri) dan Sa'id bin Jubair sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ruslan. Kalimat اكلون للسحت (*Akkālūna li al-sahti*) yang terdapat dalam Alquran, Surah al-Mā'idah (5) ayat 42, dipahami oleh keduanya dengan *risywah*.

Bertolak dari prinsip al-Syaukani, Syamsul Anwar mengkontekstualisasikan tradisi pemikiran ini untuk kasus di Indonesia. Menurutnya, pada zaman sekarang paham seperti ini akan ikut mendorong lajunya korupsi, pemberian semacam ini meskipun dilakukan oleh pemberi untuk mendapatkan haknya yang sah tetap akan merusak sistem pelayanan publik, berupa memburuknya kualitas pelayanan tersebut.⁴⁵

⁴⁴ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011), h. 91.

⁴⁵ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011), h. 93.

Menurut penulis, Seandainya memberikan suap atau menerima suap diperbolehkan untuk memperoleh hak yang mesti diterima, untuk menolak atau memberantas kebatilan yang terjadi (walaupun banyak orang yang memperbolehkan) tetap saja akan semakin rentan terhadap maraknya praktik sogok-menyogok, kolusi, korupsi, dan nepotisme bahkan akan menumbuhkan subur praktik mafia peradilan yang tidak terpuji.

Suap merupakan salah satu dosa besar, sebagaimana yang dikemukakan al-Dzahabi dalam *Kitāb al-Kabā'ir*. Menurutny, suap termasuk dosa besar yang ke-22,⁴⁶.

Hukum perbuatan *risywah* disepakati oleh para ulama adalah haram, khususnya *risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang mestinya benar. Akan tetapi, para ulama menganggap halal sebuah bentuk suap yang dilakukan dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak yang mesti diterima oleh pihak pemberi suap atau dalam rangka menolak kezaliman, kemudharatan, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemberi suap.

2. Hukuman bagi Pelaku Pungutan Liar dalam Hukum Islam

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulūl*, yaitu hukum takzir sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah *qisās* dan hudud. Dalam hal ini, Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Alquran dan hadis), mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetisinya ada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara

⁴⁶ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011), h. 94.

stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.⁴⁷

Dalam beberapa hadis tentang *risywah*, disebutkan dengan pernyataan لعن الله الراشي والمرتشى (*Allah melaknat penyuap dan penerima suap*). Para pihak yang terlibat dalam jarimah *risywah* dinyatakan terlaknat atau terkutuk, hal ini menjadikan *risywah* dikategorikan ke dalam daftar dosa-dosa besar.⁴⁸ Namun, karena tidak ada ketentuan tegas tentang jenis dan tata cara menjatuhkan sanksi maka *risywah* dimasukkan dalam kelompok tindak pidana takzir. Abdul Aziz Amir mengatakan bahwa karena dalam teks-teks dalil tentang tindak pidana *risywah* ini tidak disebutkan jenis sanksi yang telah ditentukan maka sanksi yang diberlakukan adalah hukuman takzir.⁴⁹

Lebih lanjut al-Thariqi menjelaskan bahwa sanksi “ta’zīr” bagi pelaku jarimah/tindak pidana *risywah* merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menentang/bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung (unsur yang bertujuan) untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku tindak pidana, membersihkan masyarakat dari para penjahat, lebih-lebih budaya suap-menyuap termasuk salah satu kemunkaran yang harus diberantas dari sebuah komunitas masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah, “*Barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran maka ubahlah kemunkaran itu dengan tangannya....*” (HR. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, dan Ahmad). Mencegah

⁴⁷ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011), h. 103.

⁴⁸ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011), h. 103.

⁴⁹ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011), h. 104.

kemungkaran dengan tangan sebagaimana perintah dalam hadis pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan instansi yang berwenang untuk mencegah kemungkaran tersebut.⁵⁰

Pernyataan al-Thariqi memang sangat logis, yaitu bahwa kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masyarakat, apalagi kemungkaran kolektif seperti problem suap-menyuap merupakan salah satu bentuk korupsi di Indonesia, harus ditangani langsung oleh pemerintah dan bekerja sama dengan semua komponen bangsa. Sebab, tidak mungkin individu-individu tertentu akan berusaha memberantas tradisi korupsi yang terjadi di hampir semua lini dan sektor kehidupan. Upaya pemerintah selama ini bukan hanya di masa reformasi bahkan sejak Orde lama dan Orde Baru berbagai peraturan dan sederet undang-undang telah bermunculan untuk berupaya memberantas korupsi, tetapi seperti yang bisa dilihat hasilnya masih belum memuaskan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menanggulangi dan memberantas korupsi di negeri ini sudah jauh lebih baik dan ideal bila dibandingkan dengan konsep yang masih merupakan doktrin hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Berbagai peraturan perundang-undangan merupakan bentuk konkret dari konsep ta'zīr yang ditawarkan oleh fiqh jinayah, yaitu sebuah sanksi hukum yang tidak dijelaskan secara tegas mengenai jenis dan teknis serta tata cara pelaksanaannya oleh Alqur'an dan hadis-hadis Rasulullah, melainkan diserahkan kepada pemerintah dari hakim setempat.

3. Tolok Ukur Pungutan Liar dalam Hukum Islam

Risywah yang disepakati haram oleh para ulama adalah *risywah* yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang

⁵⁰ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011), h. 104.

benar. Dengan kata lain, suap yang haram adalah suap yang akibatnya mengalahkan pihak yang mestinya menang dan memenangkan pihak yang mestinya kalah. Sedangkan suap yang dinyatakan oleh mayoritas ulama halal adalah suap yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuangkan hak yang mestinya diterima oleh pemberi suap (*al-rāsyi*) atau untuk menolak kemudharatan, kezaliman, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak pemberi suap tersebut.

Pembagian dua jenis suap yang haram dan halal ini tidak secara eksplisit bisa ditemukan dalam berbagai uraian para ulama sebab haram atau halalnya suap sangat tergantung pada niat dan motivasi penyuaap ketika memberikan suapnya sehingga ada yang dianggap halal bagi penyuaap tetapi haram bagi petugas, pegawai atau hakim sebagai pihak penerima (*al-Akhiz*).

Ibnu Taimiyyah menjelaskan tentang alasan mengapa ada satu jenis suap yang dianggap halal bagi pihak pemberi dan harapan bagi penerima suap. Ibnu Taimiyyah dalam *Majmū' Fatāwā*-nya mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah pernah memberikan sejumlah uang kepada orang yang selalu meminta-minta kepada beliau.

Atas dasar hadis ini, muncul pendapat tentang adanya salah satu bentuk suap yang bisa dibenarkan, yaitu suap yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar bisa memperoleh hak yang mestinya ia terima, atau dalam rangka menolak kemudharatan, ketidakadilan, dan kezaliman yang mengancam atau mengganggu diri pelaku. Dalam kasus yang dialami Rasulullah, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad di atas adalah rasa ketidaknyamanan Rasulullah atas tindakan seseorang yang selalu meminta-minta kepada beliau. Mungkin orang-orang yang meminta kepada Rasulullah sedikit memaksa dan tanpa rasa malu maka akibatnya beliau merasa terganggu sehingga beliau memberinya dua dinar.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang baik, maka sebagaimana lazimnya, dikemukakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis (*sociology legal research*) yaitu secara yuridis mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pungutan liar . secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada dilapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti Jenis dipandang dari sudut pandang penerapan hukum.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Takalar. Khususnya pada wilayah Polres Takalar dengan masalah tentang perang satgas dalam menangani kasus Pungutan Liar. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena terdapat kasus tentang pungutan liar di Kabupaten Takalar yang merupakan wilayah Polres Takalar, Polres Takalar merupakan salah satu lembaga yang aktif dalam melakukan sosialisasi terhadap pencegahan pungutan liar, dan Polres Takalar adalah salah satu lembaga yang mempunyai wewenang untuk menindak kasus tindak pidana pungutan liar dalam lingkup kabupaten Takalar.

Disamping itu karena domisi peneliti, agar lebih efektif dan efisien dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, biaya, dan sebagainya dibandingkan tempat lain, dan untuk mempermudah dalam penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan normative (*hukum positif*) yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder sebagai bahan utama, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dalam metode pengumpulan data melalui penelitian data kepustakaan tentang problematika dalam penanganan pungutan liar. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.⁵¹ Pendekatan terhadap hukum normatif, mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang berdaulat dan dalam penelitian ini sudah ada pada suatu situasi konkrit.
2. Pendekatan yuridis yaitu secara yuridis mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pungutan liar. Secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut pandang penerapan hukum.
3. Pendekatan Normatif Syar'i, pendekatan ini berdasarkan pada hukum Islam dengan melihat apa yang ada dalam teks-teks Al-Qur'an dan hadits serta pendapat para ulama.

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada), h.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui *Field Research* atau penelitian lapangan dengan cara *interview*, yakni kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan Tanya jawab langsung kepada *informan*. Adapun *informan* terdiri dari Satgas Saber Pungli Polres Takalar terdiri dari 6 orang, Mahasiswa 1 orang, Guru 1 orang dan masyarakat 2 orang. Adapun Informan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Data *Informan*

No	Nama	Jumlah
1.	Satgas saber pungli Polres Takalar	6 orang
2.	Mahasiswa	1 orang
3.	Masyarakat	3 orang
	Jumlah	10 Orang

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library research*) yaitu dengan menghimpun data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas. Metode ini menggunakan dua kutipan sebagai berikut:

- 1) Kutipan langsung

Kutipan yang dituliskan sesuai dengan susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikitpun.

- 2) Kutipan tidak langsung

Kutipan yang susunan kalimatnya telah diubah sesuai dengan susunan kalimat peneliti atau penulis sendiri, namun substansinya tidak berubah.⁵²

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan beberapa pihak yang berkompeten memberikan informasi atas pengamatannya dan pengalamannya dan masyarakat yang merasakan maupun menjadi korban pungutan liar.

2. Studi Dokumentasi

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, ini berlainan dengan data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.⁵³ Serta menelaah buku-buku dan hasil penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri karena peneliti lebih mengetahui maksud dan tujuan penelitian ini dengan menggunakan :

⁵² Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 188.

⁵³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Granit: Jakarta, 201), h. 57.

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara ini digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dan informan yang berupa daftar pertanyaan.

2. Buku catatan dan alat tulis

Alat ini digunakan untuk mencatat semua percakapan yang diperoleh dari sumber data.

3. Kamera

Alat ini digunakan untuk memotret oleh peneliti dalam melakukan wawancara terhadap informan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Klasifikasi data

Yang dimaksud dengan klasifikasi data adalah menggolongkan atau mengelompokkan data yang dihasilkan dalam penelitian.

- b. Reduksi data

Yang dimaksud reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milih data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.

- c. Editing Data

Yang dimaksud dengan editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi atau hubungan dan keabsahan data yang dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok

permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta diinterpretasikan dengan menggunakan analisa data kualitatif. Kualitatif yaitu menganalisis atau menggambarkan data hasil penelitian di lapangan dengan cara kata-kata tanpa menganalisis angka dan selanjutnya pengolahan data disajikan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara lengkap aspek-aspek mengenai masalah berdasarkan literatur dan data lapangan. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi dokumen. Data-data yang dikumpulkan adalah data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kemudian data yang telah dikumpulkandisajikan dalam bentuk bab pembahasan sebagai pijakan dalam mengambil kesimpulan. Kemudian tahap akhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan ujung terakhir dari sebuah penelitian.

G. Pengujian Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data yang telah terkumpul, maka perlu dilakukan pengujian keabsahan data. Dalam hal pengujian keabsahan data didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*) dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi dan menggunakan bahan referensi.

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui sebelumnya.

Dengan perpanjangan pengamatan ini akan tercipta hubungan yang baik antara peneliti dan narasumber.

Meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat agar data yang diperoleh terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai.

Triangulasi adalah teknik pengecekan data dari berbagai sumber, segala cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian dianalisis dan menghasilkan kesimpulan. Triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dari teknik observasi dicek dengan teknik wawancara.

Menggunakan bahan referensi artinya adanya pendukung untuk membuktikan keabsahan data yang diperoleh peneliti agar terhindar dari keraguan terhadap data yang diperoleh.

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiah data penelitian. Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya.

Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁵⁴



⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 2006), h.330.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Polres Takalar terletak Jl. Diponegoro, Kalabbirang, Takalar, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 90615, Indonesia.

Profil sat reskrim Polres Takalar:

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Takalar, bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka penegakan hukum, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta termasuk menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi & pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan di wilayah hukum Polres Takalar. Sat Reskrim dipimpin oleh seorang Kepala Satuan (Kasat) Reskrim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KaPolres Takalar dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali WakaPolres Takalar, sedangkan Kasat Reskrim, dibantu oleh Kaurbin Ops Reskrim (KBO).

Adapun visi dan misi Polres Takalar antara lain:

VISI :

Reserse Kriminal Polri yang profesional, proporsional, modern dan dipercaya masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.

MISI :

1. Mengembangkan sistem manajemen yang akuntabel dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.
2. Meningkatkan profesionalisme penyidik dan mengoptimalkan fungsi forensik, Identifikasi Kepolisian, serta sarana dan prasarana yang menunjang dalam rangka penegakan hukum.
3. Meningkatkan kinerja dan layanan Reserse Kriminal Polri serta meningkatkan sistem teknologi informasi yang modern.
4. Meningkatkan kerjasama dengan unsur CJS maupun lintas Departemen dan kerjasama Internasional dalam rangka penegakan hukum.
5. Meningkatkan sistem perencanaan, implementasi dan evaluasi serta pengawasan kinerja Reserse Kriminal Polri yang akuntabel.
6. Meningkatkan spirit dan soliditas Reserse Kriminal Polri serta mengembangkan etika moralitas organisasi yang berorientasi pada aspek legalitas.

Porles Takalar terdiri dari 7 wilayah diantaranya:

1. Polsek Polongbangkeng Utara
2. Polsek Polongbangkeng Selatan
3. Polsek Pattallassang
4. Polsek Galesong Utara
5. Polsek Galesong Selatan
6. Polsek Marbo
7. Polsek Mapsu

Tabel 2. STRUKTUR ORGANISASI



B. Modus Operandi Terjadinya Tindak Pidana Pungutan Liar di Kabupaten Takalar

Siklus kehidupan manusia mulai dari lahir sampai menutup usia membutuhkan pelayanan publik dari segi administrasi. Sebagai contoh, dimulai dengan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, pelanggaran tilang, pengembalian barang bukti, hingga akta kematian. Dimensi administrasi yang membutuhkan pelayanan publik tersebut rentan sekali dengan apa yang biasa kita sebut sebagai pungli atau pungutan liar. Pungutan liar sendiri adalah pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya dikenakan atau dipungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut.⁵⁵ Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada

⁵⁵ Satgas “SABER PUNGLI”, diakses dari <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/reformasi-penegakanhukum/Satgas-saber-pungli-kemenko-polhukam.pdf> diakses pada 28 Februari 2017 pukul 08.58 WIB.

pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana yang juga merupakan perbuatan tercela.

Persoalan ekonomi dan moral merupakan sebagian contoh masalah yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini. Kemiskinan, pengangguran menambah keterpurukan kondisi bangsa ini, yang akhirnya menimbulkan banyak kejahatan. Faktor ekonomi merupakan masalah yang sangat sentral saat ini yang menimbulkan kejahatan, karena banyak orang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, hal ini menyebabkan terjadinya kejahatan.

Di Indonesia sekarang marak yang namanya pungutan liar, Menurut penuturan salah satu anggota satgas di Takalar bahwa pungutan liar terjadi karena merasa sudah dilayani dengan baik sehingga dia perlu untuk berterimah kasih dengan cara memberi lebih dari yang seharusnya dibayar dan kebanyakan sekarang pelayanan masyarakat yang berbelit-belit sehingga segala sesuatu urusan kalau mau cepat selesai harus dengan cara membayar.

Semenjak di sahkannya peraturan presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar (satgas saber pungli) 21 Oktober lalu. Setidaknya ada lebih 10 ribu laporan yang tersebar diseluruh Indonesia. Berdasarkan data yang diterima per 22 November 2016, Jawa Barat menduduki peringkat teratas laporan pungutan liar.⁵⁶ DKI Jakarta menjadi daerah terbanyak kedua dengan 135 laporan setelah Jawa Barat, sedangkan Jawa Timur menjadi provinsi terbanyak ketiga dengan 105 laporan.

Berdasarkan data Satgas Saber Pungli, laporan melalui pesan singkat berada di posisi teratas dengan 7.534 laporan, disusul oleh laporan via email dengan angka 1.241 laporan.

⁵⁶CNN Indonesia (Kamis, 03 Agustus 2017 , jam 03.18)

Selanjutnya ada laporan melalui aplikasi android dengan laporan, lalu laporan telepon dengan 743 laporan, surat pos 52 laporan, dan terakhir laporan dengan datang langsung sejumlah 7 laporan.

Sementara dalam wilayah provinsi selatan sendiri, Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi, mencatat sedikitnya 55 Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) sejak Juli 2016 hingga Mei 2017 yang ditangani jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan.⁵⁷

Wakil Direktur ACC Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun mengatakan, kasus Pungutan Liar (Pungli) yang dirilis ini merupakan data OTT sejak Juli 2016 hingga Mei 2017. “Data yang dirilis Polda, ada 49 kasus OTT. Jumlah pelaku 89 orang dan jumlah bukti uang tunai sekitar Rp170 juta.

Sementara itu menurut salah seorang satgas polres Takalar, belum ada laporan ataupun yang melapor tentang kasus tindak pidana pungli. Selanjtnya di tambahkan oleh IPTU Bahtiar, S.Sos, MH yang mengatakan bahwa polres Takalar sudah maksimal dalam melakukan tindak pidana pungli, sehingga pungli di Takalar bisa di berantas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

⁵⁷<http://upeks.fajar.co.id/2017/05/19/setahun-55-kasus-ott-di-sulsel/> (Kamis, 03 Agustus 2017, jam 03.18)

Gambar 2. Pengaduan Terkait Pungli



Sumber : Data Ombusdman RI 2015

C. Peran Satgas Dalam Memberantas Pungli di Kabupaten Takalar

Berbicara tentang pungutan liar, berarti berbicara mengenai penegakan hukum dan ketertiban. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal tetapi kenyataannya hal ini jamak di Indonesia.

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat dalam upaya menciptakan kehidupan bangsa Indonesia yang aman, damai dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan hukum maka tidak akan terwujud ketertiban dan kesejahteraan bagi kehidupan setiap warga negara Indonesia. Maka proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, karena terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara.

Penegakan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban sangat erat kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam sistem peradilan hukum di negara Indonesia. Lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga yang

mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum dan ketertiban di dalam sistem peradilan Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu Aparat Kepolisian harus peka terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pelanggaran hukum dan penegakan hukum itu sendiri dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat Indonesia.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang biasa disebut Satgas Saber Pungli dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2018. Saat menandatangani Perpres bernomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tersebut, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan jajarannya agar gerakan sapu bersih pungli tidak hanya dilakukan di luar institusi penegakan hukum, tapi juga menysar kepada lembaga penegakan hukum itu sendiri.

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.⁴

Dalam menjalankan tugas tersebut, berdasarkan Perpres No. 87 Tahun 2016 Satgas Saber Pungli memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar

- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi
- c. Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar
- d. Melakukan operasi tangkap tangan
- e. Melakukan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintahan daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan pelaksanaan tugas unit saber pungli disetiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah
- g. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar

Dalam hukum ada tiga cara penanggulangan kejahatan yaitu:

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan

mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor “NIAT” tidak terjadi.

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar yang ada di Takalar Satuan tugas saber pungli telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah tindak pidana pungli. Upaya yang telah dilakukan yaitu:

- a) Sosialisai ke kantor-kantor pelayanan masyarakat
- b) Membuat baliho/spanduk tentang larangan pungutan liar
- c) Memberi himbauan kepada masyarakat

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnyasangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Peran satgas dalam meminimalisir kasus pungli yang ada di Takalar dengan melakukan tindakan represif yaitu dengan mematuhi prosedur Hukum Formil.

Sebelum dibentuk satgas Polres takalar Satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang ada di Takalar pada tahun 2017. Dan semenjak adanya

D. Bagaimana Tindak Pidana Pungli dilihat dari Hukum Islam

Secara konsep, pungli sering diperlawankan dengan korupsi dalam jumlah besar, yang terjadi karena keserakahan (corruption by greed). Tetapi apa pun kategorisasinya, pungli tetaplah merupakan salah satu bentuk korupsi, yang tidak jarang dikategorikan terjadi karena keterdesakan kebutuhan (corruption by need), dan korupsi dalam bentuk apa pun tidak boleh ditoleransi.

Keberkahan tidak diukur dari banyaknya harta yang kita miliki, bisa jadi yang sedikit akan membawa keberkahan. Keberkahan harta itu adalah, ketika ia dapat memberikan banyak manfaat pada diri kita, maupun orang lain, dan dengannya pula kita dapat lebih dekat dengan Zat Yang Maha Pemberi Harta.

Apa artinya harta banyak dan berlimpah bila didapatkan dengan cara yang tidak benar dan mendatangkan murka Allah SWT. Buat apa harta berlimpah bila do'a-do'a kita ditolak oleh Allah SWT.

Dalam wacana keislaman, kasus pungutan liar sudah dikenal pada masa awal perkembangan Islam. Hal ini dapat diketahui dalam kasus-kasus pemerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar. Bahkan tidak jarang perbuatan liar tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan aturan untuk melakukan pungutan liar berasal dari pejabat setempat.

Kerasnya sanksi yang didapat oleh pelaku pungutan liar ini dikarenakan perbuatan tersebut mengandung unsur kezaliman, hal ini dapat diketahui baik cara yang dilakukannya, maupun hasil yang diperolehnya. Perbuatan

Sementara itu, sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang tidak benar, sebagaimana tindakan pungutan liar, juga dikategorikan tidak benar.

Lebih jauh, bahwa perbuatan yang mengandung unsur kezaliman, dalam al-Qur'an dikatakan bahwa pelaku dari perbuatan zalim itu akan mendapatkan adzab yang pedih, sebagaimana firman Allah QS Al Syura/26: 42.

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

Terjemahan:

*"Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat adzab yang pedih."*⁵⁸

Kezaliman yang timbul dari perbuatan pungutan liar tersebut dapat dilihat dari beberapa unsur di dalamnya, diantaranya:

1. ketidak resmian terhadap pungutan yang dilakukan menyebabkan perbuatan tersebut dilandasi dengan ketidak sesuaian, dan tidak melalui kesepakatan bersama.

⁵⁸Kementrian Agama, *Al-quran & Terjemahan*, No: P.VI/1/TL.02.1/111/2012 (Sukses Publishing, 2012), h. 488.

2. Pemaksaan, yakni adanya unsur paksaan yang dilakukan oleh pelaku pungutan liar.
3. Mengurangi hak pihak lain, yakni pengambilan harta yang dilakukan pelaku pungutan liar tentu akan berdampak pada berkurangnya harta orang yang dikenakan pungutan tersebut.
4. Tekanan yang dirasakan oleh pihak yang dikenakan pungutan, ia merasa tidak tenang jika perbuatan pungutan liar tersebut terusmenimpanya.
5. Tidak ridha. Hal ini tentu dirasakan oleh pihak yang dikenakan pungutan liar, di mana ia memberikan uangnya dengan rasa terpaksa sehingga menimbulkan ketidakridhaannya atas harta yang diberikannya kepada pihak pemungut tersebut.

Tindak pidana pungutan liar sangat identik dengan penyalahgunaan jabatan yang didefinisikan sebagai perbuatan khianat dalam perspektif Islam. Karena jabatan yang telah disandang oleh seseorang adalah sebuah kepercayaan dari rakyat yang telah terlanjur menaruh harapan padanya. Atau jabatan yang langsung dibebankan atas nama negara yang tentunya bertujuan untuk menjalankan berbagai program yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat. Terlebih lagi jika amanat itu menyentuh pada ranah hukum seperti pegawai pada bidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dll yang berbasis kepada keadilan yang diinginkan oleh semua pihak. Amanat yang telah diemban itulah yang tentunya wajib untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

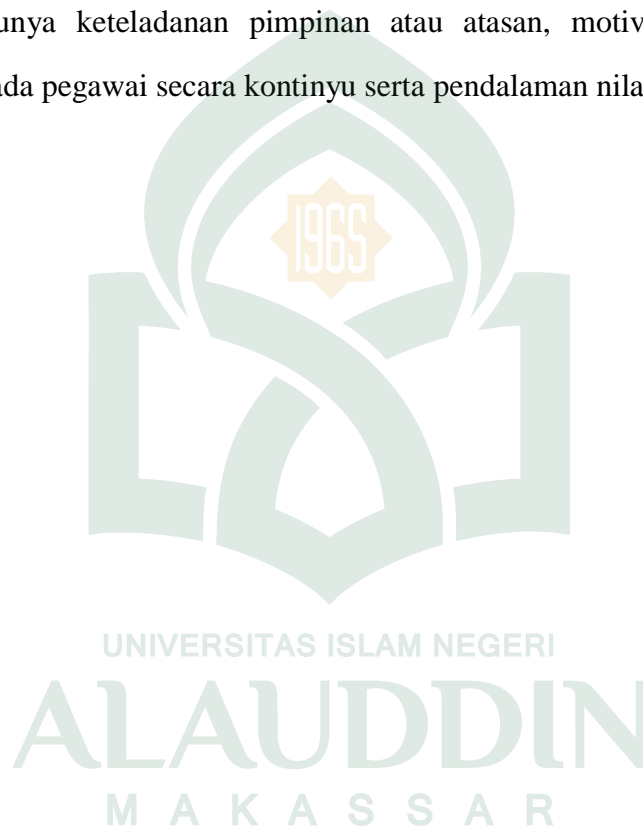
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Takalar dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan tentang Tindak Pidana Pungutan Liar dalam KUHP (Studi kasus Kab Takalar) yaitu:

1. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pungli dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, mempersulit proses, mengulur waktu dan meminta imbalan.
2. Satuan tugas sapu bersih pungutan liar atau biasa disebut satgas saber pungli dibentuk sesuai dengan peraturan presiden No. 87 Tahun 2016. Dalam memberantas pungli di kab Takalar satgas melakukan 3 pendekatan yaitu:
 - a. Pre-emptif
 - 1) Sosialisai ke kantor-kantor pelayanan masyarakat
 - 2) Membuat baliho/spanduk tentang pungutan liar
 - 3) Memberi himbauan kepada masyarakat
 - b. Preventif
Menekankan kepada masyarakat dan pejabat pemerintah tentang bahayanya pungutan liar.
 - c. Represif
Menjalankan prosedur hukum yang sudah ada yaitu (penyelidikan, penyidikan, penyitaan, persidangan dan penahanan)
3. Dalam hukum Islam pungutan liar dikategorikan sebagai perbuatan yang haram karena mengandung kezaliman (haram)

B. *Implikasi Penelitian*

Adapun Implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Di perlukan regulasi yang baik, pengawasan internal maupun eksternal dan peran serta masyarakat.
2. Memberlakukan aturan hukum yang semestinya dengan menindak secara tegas pelaku pungli.
3. Perlunya keteladanan pimpinan atau atasan, motivasi dan sugesti kepada pegawai secara kontinyu serta pendalaman nilai-nilai agama.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Bisri Ilhami, *Hukum Pidana Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Alqaprint, 2003
- BPKP 2002, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberat dan Peringan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Daud Ali Muhammad. *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Dirdjosisworo Soedjono. *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi*, Cetakan ke-2 Bandung: Sinar Baru, 1983
- Huda Chairul. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Cet IV: Jakarta: Kencana, 2011
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. LII: Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa
- L & J Law Frim. *Bila Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*, Jakarta: PT Penebar Swadaya, 2009.
- Maramis Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2006.
- Praja Juhaya S., *Hukum Islam*. Cet. XX; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014
- Prasetyo Teguh dan Barkatullah Abdul Halim. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Salim Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press. 1991
- Situmorang Viktor. M. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Soerodibroto R. Soenarto. *KUHP dan KUHP (dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1991

Wiyono. R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

W.P.J. Pompe, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Yarsif Watampone, 2010.

<http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html>

”KUHP”, *Wikipedia*, <https://id.m.wikipedia.org> (25 Februari 2017).

<http://id.m.wikipedia.org>



The logo of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar is a light green emblem. It features a central shield-like shape with a pointed top, containing a smaller shield with the year '1965' in orange. The main shield is flanked by two vertical bars and a central arch-like element at the bottom.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax. 424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/2005/2017

Gowa, 31 Mei 2017

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada Yth

**Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel.**

di

Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Syamsir Alam
Nim : 10300113030
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana & Ketatanegaraan
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Takalar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar dalam KUHP
(Studi Kasus Kab. Takalar)***

Dengan Dosen Pembimbing :
1. **Dr. Marilang, SH. MH**
2. **Subhan Khalik, S.Ag. M.Ag**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Kantor POLRESTABES Takalar 5 Juni 2017 s/d 14 Juli 2017.

Demikian harapan kami dan terima kasih.

Wassalam

Samata, 31 Mei 2017


Rektor
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
Nip. 19621016 1990031 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar Di Samata Gowa.



1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 7 8 8 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 7714/S.01P/P2T/06/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Takalar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/2005/2017 tanggal 31 Mei 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SYAMSIR ALAM**
Nomor Pokok : 10300113030
Program Studi : HPK
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANAN PUNGUTAN LIAR DALAM KUHP (STUDI KASUS KAB. TAKALAR) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **05 Juni s/d 14 Juli 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 05 Juni 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. H. Padjonga Daeng Ngalle No.3 Kabupaten Takalar

Takalar, 06 Juni 2017

Nomor : 070/291/KKBP-VI/2017
Lamp. : -
Perihal : **Izin Penelitian**

K e p a d a
Yth. KAPOIRES Takalar
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sul-Sel nomor : 7714/S.01P/P2T/06/2017, tanggal 05 Juni 2017, perihal izin penelitian, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : SYAMSIR ALAM
Tempat/Tanggal Lahir : Malaginna, 22 April 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mah. FSHI UIN Alauddin Makassar
Alamat : Malaginna Desa Lassang Kec. Polongbangkeng Utara
Kab. Takalar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja saudara dalam rangka penyusunan *Skripsi* dengan judul :

***"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR
DALAM KUHP (STUDI KASUS KABUPATEN TAKALAR)"***

Yang akan dilaksanakan : 05 Juni s/d 14 Juli 2017
Pengikut / Peserta : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Skripsi* kepada Bupati Takalar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan sepeperlunya.

An. Kepala,
Kasubag Tata Usaha

SYAMSUDDIN, S. Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19691231 199401 1 006

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Up. Ka. Badan Kesbang Prov. Sulsel di Makassar;
2. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
3. Para Anggota FORKOPINDA Kab. Takalar masing-masing di Takalar;
4. Kepala Bappelitbang Kab. Takalar di Takalar;
5. Dekan FSHI UIN Alauddin Makassar di Makassar;
6. Sdr.(i) **SYAMSIR ALAM** di tempat;
7. Pertinggal...

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR TAKALAR



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : SKET / 124 / VIII / 2017 / Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kepala Kepolisian Resor Takalar, Kepala Satuan Reserse Kriminal menerangkan bahwa :

Nama : SYAMSIR ALAM
Tempat / Tanggal Lahir : Takalar / 22 April 1995.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln Muh Yasin Limpo No 36 Samata Sunggu Minasa Kab Gowa.

Berdasarkan surat dari Fakultas Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : Sl. 1 / PP .00.9 / 2005 / 2017, tanggal 31 Mei 2017 , benar telah melakukan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Takalar dalam rangka penyusunan tugas akhir berupa penyusunan Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTUN LIAR DALAM KUHP (STUDI KASUS KAB TAKALAR)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takalar, 03 Agustus 2017
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT TAKALAR
KASAT RESKRIM



ANDI ABIMUDDIN, SH
AKP NRP 68100497

UNIVERS

ALAUDDIN
MAKASSAR

Pedoman Wawancara

1. Dimana biasanya terjadi tindak pidana pungutan liar ?
2. Kapan bisa dikatakan sebagai pungli ?
3. Apa yang menyebabkan seseorang/pejabat negara bisa melakukan pungli ?
4. Bagaimana cara menanggulangi pungli ?
5. Siapa yang paling bertanggung jawab atas kasus tindak pidana pungutan liar ?
6. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana pungli di Takalar ?
7. Bagaimana peran satgas dalam memberantas pungutan liar di kabupaten Takalar ?
8. Kapan satgas saber pungli polres Takalar didirikan?
9. Berapa tim satgas yang ada di polres Takalar? Apakah ada tim khusus pendidikan, lalu lintas dan instansi lainnya ?
10. Tindakan apa yang dilakukan satgas ketika mendapati kasus pungli?

Dokumentasi







RIWAYAT HIDUP



SYAMSIR ALAM, Takalar, pada tanggal 22 April 1995. Merupakan anak pertama dari Tiga bersaudara. Buah hati dari pasangan Sumarlin dan Mariati. Mulai memasuki jenjang pendidikan formal tahun 2001 hingga 2007 di SD Negeri 49 Panjo'jo, kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun 2007 hingga 2010 di SMP Negeri 2 Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Pada Tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah SMA Negeri 1 Polongbangkeng Utara dan tamat pada tahun 2013. Saat penulis duduk di bangku SMA organisasi yang telah diikuti adalah : PMR Takalar.

Setelah menamatkan pendidikan di SMA, Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mengambil jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2013. Beberapa organisasi yang sempat diikuti saat penulis duduk di bangku kuliah, diantaranya: IPPS (Ikatan Penggiat Peradilan Semu), PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia), dan HIPERMATA (Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar).